BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.¹

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah salah satu lembaga, yang dahulu juga di kenal sebagai rumah penjara, yakni dimana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

---

¹Aris Irawan, “Proposal Penelitian Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB biaro(Studi Keberadaan Mantan Narapidana di Masyarakat)”, Blog Arisirawan, <https://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana> (20 Juni 2018).

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963, yakni di dalam pidato mana beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.²

Berbagai tindakan kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, narkoba, penipuan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi hingga faktor lingkungan sekitarnya. Kesemua tindakan kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana

---

²Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 165.

yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada seseorang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitif dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan, dimana manusia tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi yang modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karena perkembangan hukum.

---

³Octavia Sri Handayani, *“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Recidive Di Lapas Kelas II Asragen”* 2010.

⁴Ardy, *“Tujuan Hukum Pidana”* <https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/11/tujuan-hukum-pidana> (31 Mei 2018).

(timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.⁵

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “Pembalasan” terhadap orang-orang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.⁶

Kita mengenal jenis-jenis hukuman yang bersifat fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan, dan bahkan hukuman mati. Seiring perkembangan zaman, maka hukuman yang bersifat fisik lama lama digantikan dengan pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh hakim. Seiring dengan itu, ekstensi bangunan tempat penahanan semakin diperlukan apa lagi dengan adanya pencabutan kemerdekaan.

Berbicara tentang penjara di Indonesia, dewasa ini kita mengenal istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar No.12 Tahun 1995

---

⁵Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.51

⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Penologi*, (Bandung:Armico, 2008), hlm.115

tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan lapas merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya. Pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan terpidana untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari Lembaga Pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para napi sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat.⁷

Prinsip substansial dalam sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara

---

⁷Andi Hamzah, 2008, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27

pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Berangkat dari tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan tersebut maka diperlukan suatu pembinaan terhadap narapidana, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ,“ Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Bertujuan agar sekeluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat mengembangkan diri dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat agar dapat turut mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena di mana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “*Humanum enim est*

peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁸

Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai negara. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁹ Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *Recidive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya *Recidive*. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem

---

⁸Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 432.

⁹“Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)” http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recidive.Pdf, di akses pada tanggal 31 Mei 2018 jam 18.30 WIB

peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif dan terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Delik pengulangan (*Recidive*) tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi di Pasal 486-488, mengatur tentang penerapan unsur *Recidive* dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivis khusus, tanpa batasan jumlah pengulangan. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasi sebagai residivis atau tidak digantungkan pada jangka waktu tahun antara hukuman yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini memandang jika dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang melakukan kejahatan yang sama kembali melakukannya, maka ia merupakan orang yang harus diwaspadai.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaankemandirian. Semua ini dilakukan bawasanya narapidana merupakan masyarakat daribangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan

mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Perkembangan tujuan pembinaan narapida berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun Bangsa dan Negara.
3. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidaksesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat. Dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.31/1999 tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan manusiawi dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu.

Membiarkan seorang narapidana tanpa memberikan rehabilitasi dan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana tersebut, sebab narapidana sangat rentan untuk mengulangi lagi perbuatan yang pernah ia lakukan, pengulangan tindak pidana tersebut akan selalu terjadi jika narapidana tidak ditangani secara serius, narapidana sesungguhnya adalah manusia yang masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan kearah yang positif dan mampu berubah menjadi seorang yang lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana tersebut melalui pembinaan yang baik, efektif dan dilaksanakan secara konsistenserta berkesinambungan yang dilaksanakan oleh para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, dan ahli dalam bidangnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengulangan kembali tindak pidana (*Recidive*) ?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana *Recidive*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui Pengaruh Pola pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

- b. Mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

2. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Untuk memperkaya keilmuan peneliti dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Kegunaan Praktis, Dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan guna mencegah pengulangan tindak pidana.
- c. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) adalah keadaan dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat khusus untuk narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dan memperoleh pembinaan.

E. Kerangka Teoritik

Pada tahap ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum

---

¹⁰Dellyana,Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hlm. 32

¹¹Ibid hlm.33

bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.¹²

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

¹²Satjipto Rardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 2008), hlm.24

¹³Ibid, hlm.34

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

---

¹⁴Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm.42

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Teori Pembinaan Narapidana

Teori ini menjabarkan tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematic sifat pidana yang menyatakan bahwa, *irechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.¹⁵

Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

---

¹⁵Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.27

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pembedaan.¹⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiapwarga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridisfilosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:¹⁷

- a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
- b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara

---

¹⁶Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitely, *Pidana Penjara mau Kemana*, (Jakarta:CV.Indhill co, 2007), hlm.6

¹⁷Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pembedaan, bahwa:¹⁸

“Pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa.

---

¹⁸ Ibid, hlm.103

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak – hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah “ Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara.¹⁹

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Secara etimologis., Pemasyarakatan merupakan kata kerja yang dibendakan. Pemasyarakatan berasal dari kata kerja memasyarakatkan. Memasyarakatkan mengandung dua arti, pertama yaitu menyebarkan ide kepada masyarakat luas untuk diketahui, dimiliki atau dianut. kedua, adalah melakukan usaha melalui proses yang wajar untuk dalam rangka memperlakukan anggota masyarakat agar bersikap atau berperilaku sesuai dengan tatanan norma yang terdapat dalam masyarakat.

Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah ;

“ Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

---

¹⁹Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm.45

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah dalam pemasyarakatan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- c. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranada untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- e. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, Anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
- f. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS“

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Menyadari hal itu maka telah lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada

aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, atau Klien Pemasarakatan yang mempunyai preventif, kuratif, dan edukatif.

Pemasarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan secara manusiawi melalui perlindungan terhadap hak-hak terpidana. Komitmen ini pun secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dimana Sistem Pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh.

4. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi pada dalam hal seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu

putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. *Recidive* ini menjadi alasan untuk memperberat pemidanaan.

Recidive atau pengulangan tindak pidana mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang terjadi dalam hal seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht vaneewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

Pengertian dari *recidive* hampir sama dengan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana (*concursum realis*), tetapi perbedaannya ada pada ditetapkannya Putusan Hakim yang bersifat tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut *residivise*. *Recidive* terbagi menjadi dua jenis yaitu *recidive* umum (*general recidive*) dan *Recidive* khusus (*special recidive*). *Recidive* umum adalah pengulangan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Recidive* khusus adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai *Recidive*. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidanatertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia menganut *Recidive* khusus. Pengaturan *Recidive* khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara khusus dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Tenggang waktu pengulangan tindak pidana juga diatur secara khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum ada perubahan dari pertama kali diterbitkannya sampai dengan hari ini. Dalam

rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai peraturan perundangan menjadi sangat penting. Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam rangka untuk tujuan mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.²¹

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis Sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau

---

²⁰Musa Darwin Pane, *Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Penggantian Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.unpas.ac.id/9541/>, 2016, hlm. 24, diakses pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 19.34 WIB

²¹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 60.

peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.²²

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek penelitian.

Data primer diperoleh dengan cara :

- 1) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap pejabat atau orang-orang yang ada kaitanya dengan obyek yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan judul Tesis.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
  - c) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
  - d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
  - e) Keputusan Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990
Tentang Pola Pembinaan Narapidana

---

²²Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 76

f) Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1
tertanggal 8 Februari 1985

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, makalah, karya ilmiah, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau kamus bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini.

6. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Majalengka. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Majalengka merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan serangkaian program pembinaan khusus bagi narapidana, dengan demikian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni mengenai pengaruh pembinaan narapidana dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Majalengka.